

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Bayar Retribusi Tak Tertib, Sampah Tak Diangkut
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Kamis, 17 Mei 2018

Bayar Retribusi Tak Tertib, Sampah Tak Diangkut

BANDUNG, (PR).-

PD Kebersihan Kota Bandung melakukan penyisiran kepada para wajib retribusi sampah baik itu rumah tangga maupun komersial. Untuk meningkatkan ketertiban membayar retribusi, PD Kebersihan menawarkan MoU, dan bagi RW yang tidak melakukan MOU, tidak akan mendapat pelayanan pengangkutan sampah.

"Bulan ini sedang penyisiran wajib retribusi oleh tim. RW yang tidak MoU terpaksa di TPS (tempat pembuangan sementara) ditahan, tidak akan dilayani," ujar Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdyana Hadimin, di Bandung, Rabu (16/5/2018).

Deni menuturkan, pengangkutan sampah warga Kota Bandung yang mencapai 1.600 ton per hari belum sejalan dengan ketertiban warga dalam membayar biaya jasa pelayanan kebersihan. "Penyebabnya karena ada RW yang belum MoU dengan PD Kebersihan. Karena penagihan itu dikelola RW, RW tidak intensif menagih kepada keluarga wajib retribusi," ujarnya.

Selama ini, kata Deni, PD Kebersihan tidak bisa memilah berdasarkan sampah yang telah dibayar atau belum. Semua sampah yang terkumpul di TPS ataupun di sisi jalan harus diangkut.

Menurut Deni, selain kendala penagihan dari RW kepada warga, pemahaman warga juga membuat iuran sampah seolah tidak wajib karena tanpa membayar pun pengangkutan sampah wajib dilakukan oleh PD Kebersihan. Padahal, kata Deni, produksi sampah rumah tangga bisa mencapai 1.000 ton per hari. Jumlah itu hampir 70 persen dari total produksi sampah 1.600 ton per hari.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketertiban membayar, PD Kebersihan menawarkan MoU dengan RW. Lewat MoU, warga kurang mampu juga bisa terdata dan mendapat subsidi. RW pun mendapat insentif 10 persen sebagai biaya pemasaran. "Disarankan MoU. Dengan MoU ada kepastian pembayaran. RW juga jadi ada kepastian pengangkutan misalkan seminggu dua kali," katanya.

Saat ini, kata dia, 70 persen RW di Kota Bandung sudah MOU. Tim masih mendatangi sisa RW yang belum melakukan MOU.

Sementara itu, sisa produksi sampah sebanyak 600 ton per hari, berasal dari sektor komersial. Sektor ini juga belum seluruhnya tertib membayar dan baru 40 persen yang tertib bayar.

Meskipun demikian, sektor komersial mulai dari mal, hotel, apartemen, dan restoran, menjadi penyumbang tertinggi. Dengan biaya Rp 50.000 per meter kubik, satu perusahaan bisa menyumbang Rp 200.000 hingga Rp 55 juta.

Tim penyisiran juga menasar kelompok komersial agar mau MOU. Selain banyak yang menghindar, banyak toko kecil yang bekerja sama dengan RW agar membuang sampah ke TPS. Mereka menyiasati bayar setara rumah tangga yang berkisar Rp 3.000-Rp 20.000 per keluarga. (Muhammad Fikry Mauludy)***